



IMPLEMENTASI AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN UNTUK GENERASI MILENIAL DALAM MENGHADAPI ERA 5.0

Ferry Irawan^{1*}, Andri Marfiana², Agus Sunarya Sulaeman³

¹⁾ ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ andri.marfiana@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ asunarya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

* untuk penulis korespondensi

Abstract

Millennials have different characteristics from other generations. This generation interacts earlier with devices and information & communication technology at a very young age. On the other hand, the millennial generation is also known as a generation that tends to be more pragmatic in life. The current millennial generation, especially those in high school is the generation that will be the next leaders in the next 20 years. The development of technology that is very dynamic and fast at this time really changes many things, including employment opportunities for the younger generation. The seminar entitled "accounting and taxation for the millennial generation in facing Era 5.0" aims to provide knowledge and awareness about the importance of accounting and taxation in the future. This seminar was carried out with two approaches: face-to-face, and also relay through the youtube channel. The seminar participants consisted of teachers and students of SMK accounting programs in Tangerang City. There were 60 participants who attended directly, while around 100 participants who followed through the YouTube channel. The seminar activity is divided into three lecture sessions, and a question and answer session.

Keywords: millenials, society 5.0, accounting, taxation

Abstrak

Generasi milenial memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi lainnya. Generasi ini lebih cepat berinteraksi dengan gawai dan teknologi informasi & komunikasi di usia yang sangat muda. Di sisi lain, generasi milenial juga dikenal sebagai generasi yang cenderung lebih pragmatis dalam menjalani kehidupan. Generasi milenial saat ini khususnya yang duduk di bangku SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas) merupakan generasi yang akan memimpin Indonesia dalam waktu 20 tahun mendatang. Perkembangan teknologi yang sangat dinamis dan cepat saat ini sungguh mengubah banyak hal, termasuk lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Seminar dengan tema akuntansi dan perpajakan untuk generasi milenial dalam menghadapi Era 5.0 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya akuntansi dan perpajakan di masa depan. Seminar ini dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu secara tatap muka langsung, dan juga relay melalui kanal youtube. Peserta seminar terdiri dari guru pendamping dan siswa/siswi SMK program akuntansi di Kota Tangerang. Peserta yang hadir secara langsung sebanyak 60 orang, sedangkan peserta yang mengikuti melalui kanal youtube sekira 100 orang. Kegiatan seminar dibagi menjadi tiga sesi materi dan satu sesi tanya jawab.

Kata Kunci : milenial, *society 5.0*, akuntansi, perpajakan

PENDAHULUAN

Era revolusi industri pertama dimulai pada Tahun 1780 dengan penemuan mesin-mesin berbahan bakar minyak, uap dan air. Selanjutnya, pada tahun 1870, penemuan energi listrik menandai dimulainya era industri kedua. Hal ini diindikasikan dengan teknologi yang digunakan untuk produksi masal. Era industri ketiga yang merupakan kehadiran otomasi dalam proses produksi lahir di era Tahun 1970-an (Nahavandi, 2019).

Era Industri 4.0 yang saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat dunia ternyata belum mencapai tingkat tertinggi. Di berbagai literatur banyak disebutkan adanya era *society 5.0*. Era masyarakat *society 5.0* memiliki konsep adanya harmonisasi antara perkembangan teknologi informasi, *internet of things* (IoT) dan robot kolaboratif dengan aspek-aspek kehidupan yang mempertimbangkan sisi humanis (Al Faruqi, 2019; Aslam et al., 2020; Demir et al., 2019; Prassida & Asfari, 2022). Manusia dan teknologi saling terkait dalam hubungan yang saling mendukung (Longo et al., 2020). Istilah *Society 5.0* secara formal dibentuk oleh European Commission pada tahun 2021 (Adel, 2022). *Society 5.0* memberikan peluang baru pada satu sisi namun juga menghilangkan kesempatan di sisi lain. Ada kekhawatiran bahwa kemajuan



teknologi dapat membuat fungsi-fungsi rutin yang biasa dilakukan oleh para profesional dapat tergantikan, sehingga berpotensi menciptakan atau menambah pengangguran (Iscan, 2021). Oleh karena itu, individu dan bisnis dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi tersebut (Paschek et al., 2019).

Perubahan dari era industri 4.0 menuju 5.0 membawa perubahan peran akuntan. Fungsi dasar akuntansi berupa penyiapan informasi lambat laun tergantikan oleh teknologi (Ghofirin & Primasari, 2021). Selanjutnya, *Society 5.0* menjadi tantangan bagi dunia pendidikan termasuk pendidikan vokasi (Anwar, 2021). Pendidikan vokasi akuntansi, misalnya, memfokuskan pada penyiapan keterampilan teknis berupa penyiapan laporan keuangan sesuai siklus akuntansi. Di sisi lain proses, proses mencatat transaksi (jurnal), memindahkan catatan ke buku besar (posting), membuat jurnal penutup (*closing entries*) dan jurnal balik (*reversing entries*) saat ini dapat dilakukan dengan sangat baik oleh aplikasi komputer. Peserta didik diharapkan mampu mengkolaborasikan antara *softskill* dan *hardskill* serta memanfaatkan teknologi dengan baik sehingga lulusan pendidikan vokasi tetap mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja baik di lingkup nasional maupun internasional (Nugroho, 2022).

Keterampilan dalam bidang perpajakan juga menjadi salah satu capaian pembelajaran dari peserta didik pendidikan vokasi (Rusli & Nainggolan, 2021). Siswa diharapkan dapat mengklasifikasikan transaksi-transaksi yang merupakan Objek PPh, Objek PPN dan Objek Pajak Daerah serta lainnya. Selanjutnya, menyusun dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan bagi orang pribadi maupun badan atau perusahaan. Saat ini cukup banyak berkembang aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk penyiapan informasi pelaporan pajak. Untuk menghindari disrupsi yang dapat mengurangi kesempatan kerja para lulusan sekolah vokasi maka perlu disiapkan suatu kemampuan yang lebih baik di tingkat analitik sehingga peran sumber daya manusia tetap dibutuhkan dalam pelaporan pajak (Ilmianah, 2019).

Untuk memberikan pemahaman kepada seluruh siswa SMK terkait dengan implementasi akuntansi dan perpajakan untuk menghadapi era *society 5.0* diperlukan suatu upaya literasi. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di sekolah mungkin belum dapat menjangkau perkembangan terkini (Sudarsana, 2016). Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menyebarkan pengetahuan dimaksud. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh siswa SMK bidang akuntansi. Selain itu, program pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat konsepsi para siswa SMK terhadap pentingnya akuntansi dan pajak sehingga mereka memiliki kesiapan di masa yang akan datang. selanjutnya, penulis mengelaborasi metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, serta simpulan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk seminar dan *relay* melalui kanal youtube dan aplikasi *zoom* (Irawan, 2021). Di masa pandemi kegiatan tatap muka secara langsung dibatasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Secara teknis, pelaksanaan ini dikategorikan dalam tiga tahap. Pertama tahap persiapan. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan Tahap terakhir adalah evaluasi. Hal-hal yang dilakukan pada tahap persiapan antara lain adalah mengidentifikasi kebutuhan seminar oleh pengabdian dan penyelenggara, termasuk juga pembahasan mengenai calon peserta, pendekatan dan teknis seminar, serta capaian yang diharapkan atas kegiatan seminar.



Gambar 1. Pembukaan Seminar

Tahap Selanjutnya kedua yaitu pelaksanaan seminar. Seminar diselenggarakan pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir langsung sebanyak 60 orang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa SMK di lingkungan Kota Tangerang. Sedangkan, 100 orang mengikuti seminar secara daring. Seminar dibuka oleh seorang *master of ceremony* (MC). Selanjutnya, diadakan dengan do'a bersama agar kegiatan seminar berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pemberian kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Nusantara 1 (Gambar 1). Berikutnya, diteruskan dengan penyampaian materi oleh tiga orang narasumber, yaitu Dr. Agus Sunarya, Ak. Andri Marfiana, MBA, dan Ferry Irawan, MPP. Agus Sunarya Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN. Andri Marfiana dan Ferry Irawan merupakan dosen pengampu mata kuliah perpajakan Politeknik Keuangan Negara STAN. Penyampaian materi oleh narasumber pertama dengan topik mengenal akuntansi pemerintahan. Penyampaian oleh narasumber kedua terkait pengantar dan konsep perpajakan. Selanjutnya, materi mengenai pembayaran dan pelaporan pajak disampaikan oleh narasumber ketiga. Waktu yang dialokasikan untuk ketiga pemateri adalah 120 menit (Gambar 2).



Gambar 2. Penyampaian materi oleh tiga narasumber

Tahap berikutnya adalah evaluasi, yaitu meminta *feedback* dari para peserta melalui sesi tanya tanya yang dipandu oleh Moderator. Moderator memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Penyampaian pertanyaan dapat dilakukan secara langsung (*open mic*) maupun melalui *chat box*. Moderator mengalokasikan



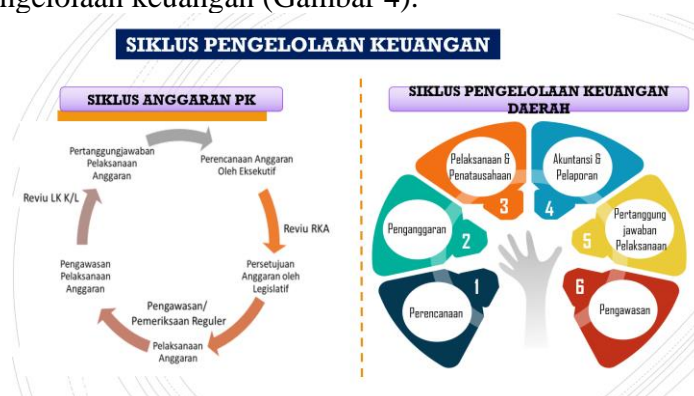
waktu sekitar 45 menit. Pertanyaan yang diajukan perbedaan akuntansi pemerintah pusat dan daerah, peluang karir di perpajakan dan masalah terkait keuangan lainnya sesuai dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber. Akan tetapi, moderator mempersilakan jika para peserta bertanya di luar materi dengan syarat masih berhubungan dengan tema seminar (Gambar 3).



Gambar 3. Sesi Pertanyaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasumber pertama menyampaikan hal-hal antara lain: dasar hukum dan pola pengelolaan keuangan pemerintah, asumsi dasar dan karakteristik kualitatif laporan keuangan, dan jenis-jenis (unsur) laporan keuangan pemerintah pusat berbasis akrual (Gambar 2). Narasumber menjelaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan keuangan negara terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya, narasumber menjelaskan secara rinci mengenai siklus pengelolaan keuangan (Gambar 4).



Gambar 4. Siklus Pengelolaan Keuangan

Narasumber menjelaskan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, Presiden menguasai kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengelola keuangan negara. Di sisi lain, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah kepada Gubernur, Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Secara



teknis pengelolaan keuangan di daerah dilaksanakan oleh kepala satker pengelolaan keuangan daerah dan kepala satker perangkat daerah. Tugas Menteri Keuangan antara lain melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang, melaksanakan fungsi bendahara umum negara (BUN), dan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Berikutnya, Narasumber juga menguraikan perbedaan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan, entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian, setiap satuan kerja yang mendapatkan dokumen pelaksanaan anggaran adalah entitas akuntansi dan oleh karena itu, wajib menyusun laporan keuangan (Farid & Y. Anni Aryani, 2016).

Narasumber kedua menyampaikan beberapa hal terkait konsep dasar pajak dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh para lulusan SMK di masa depan (Gambar 5)



Gambar 5. Narasumber kedua

Narasumber menyampaikan beberapa materi antara lain, apa yang dimaksud dengan pajak, transaksi-transaksi apa saja yang dikenakan pajak, dan siapa saja yang harus membayar pajak. Terdapat empat jenis pungutan yang keberadaannya diatur dengan undang-undang, dan tidak ada larangan, yaitu: pajak, sumbangan, retribusi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pajak, retribusi dan PNBP diatur berdasarkan undang-undang. Sedangkan sumbangan



merupakan pungutan sukarela yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah.

Selanjutnya, dijelaskan pula pembagian pajak berdasarkan institusi pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Suryanto et al., 2019). Pajak pusat meliputi PPh, PPN, PPnBM, PBB P-3 dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pemungutannya oleh provinsi, dan kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh provinsi antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB P-2 dan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan).

Berikutnya, narasumber menjelaskan fungsi pajak yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur (Anggraeni, 2016). Fungsi anggaran memiliki makna bahwa pajak yang dipungut berfungsi sebagai sumber penerimaan APBN/APBD. Sedangkan, fungsi mengatur memiliki makna bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa ada keengganan untuk membayar pajak antara lain: tidak ingin berbagi, tidak ada imbalan langsung, dan belum menganggap bahwa pajak adalah salah satu bentuk gotong royong.

Narasumber ketiga menyampaikan beberapa hal terkait dengan prosedur formal dalam administrasi pajak (Gambar 6). Dijelaskan bahwa untuk membayar pajak, setelah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, membutuhkan adanya nomor pokok wajib pajak (NPWP). NPWP dapat diperoleh secara *online* dengan mengunjungi situs www.pajak.go.id. Apabila dalam menjalankan kewajiban perpajakan memenuhi kendala, wajib pajak dapat menghubungi petugas pajak, baik *account representative* (AR) maupun *call center* pajak. Saat ini untuk membayar pajak, wajib pajak dapat menggunakan *e-billing* (semacam *virtual account*). Kode *e-billing* ini memastikan bahwa jenis pajak, besarnya pajak, masa pajak/tahun pajak yang dibayarkan telah sesuai (Putri, 2019).

Berikutnya, narasumber menjelaskan persiapan yang harus dihadapi generasi milenial di masa depan terkait pajak. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, serta proses bisnis yang sangat dinamis menjadi tantangan tersendiri. Generasi milenial saat ini merupakan calon wajib pajak potensial di masa depan. Oleh karena itu, kesadaran akan pajak dan ketentuan pajak tentu menjadi sebuah prasyarat bagi keberlangsungan penerimaan negara di masa depan. Generasi saat ini mungkin akan menjadi pengusaha, petugas pajak ataupun konsultan pajak. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentu seluruh komponen tersebut akan dapat bersinergi dan berkolaborasi menuju kemandirian bangsa melalui penerimaan pajak yang optimal (Waluyo, 2009).

Pada sesi tanya jawab dan komentar. Para peserta khususnya para siswa mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama terkait dengan prospek pekerjaan di masa depan, kiat dan tips untuk dapat menjadi ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, ditanyakan pula bagaimana untuk menimbulkan kesadaran pajak bagi generasi muda. Seluruh pertanyaan dan komentar direspon dengan baik oleh seluruh narasumber.



Gambar 6. Narasumber ketiga

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pertanyaan dan komentar yang disampaikan oleh para peserta, dapat diperoleh sebuah informasi bahwa kegiatan seminar ini memberikan manfaat dan daya guna yang baik. Siswa SMK khususnya dengan bidang kekhususan akuntansi mengetahui apa saja tantangan yang mereka hadapi di masa depan. Selain itu, harapan untuk menimbulkan kesadaran akan pajak bagi generasi muda merupakan salah satu investasi yang harus terus ditingkatkan.

Saran

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan seminar. Antusias peserta sangat besar, namun karena kapasitas ruangan yang kurang memadai sehingga jumlah peserta seminar yang hadir secara langsung dibatasi. Untuk itu, kegiatan seminar berikutnya dapat dilaksanakan dengan ruangan yang kapasitasnya lebih besar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Selain itu, terdapat permintaan dari beberapa sekolah untuk dapat didampingi pada saat penyusunan modul atau buku ajar akuntansi dan perpajakan bagi siswa SMK. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih bersifat berkelanjutan dan dinamis di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Adel, A. (2022). A Conceptual Framework to Improve Cyber Forensic Administration in



- Industry 5.0: *Qualitative Study Approach. Forensic Sciences*, 2(1), 111–129. <https://doi.org/10.3390/forensicsci2010009>
- Al Faruqi, U. (2019). Survey Paper : Future Service in Industry 5.0. *Jurnal Sistem Cerdas*, 02(01), 67–79.
- Anggraeni, T. D. (2016). Keterpenuhan Prinsip Keadilan Dalam UU Pengampunan Pajak. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(2), 165–181.
- Anwar, M. (2021). Analysis of vocational interests and student's perception of work-based on *society 5.0* towards learning outcomes. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(1), 57–64. <https://doi.org/10.29210/02021845>
- Aslam, F., Aimin, W., Li, M., & Rehman, K. U. (2020). Innovation in the era of IoT and industry 5.0: Absolute innovation management (AIM) framework. *Information*, 11(2), 1–24. <https://doi.org/10.3390/info11020124>
- Demir, K. A., Doven, G., & Sezen, B. (2019). Industry 5.0 and Human-Robot Co-working. *Procedia Computer Science*, 688–695.
- Farid, M., & Y. Anni Aryani. (2016). Knowledge Management Dan Kinerja Organisasi Sektor Publik : Studi Empiris pada Entitas Akuntansi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 1–13.
- Ghofirin, M., & Primasari, N. S. (2021). Readiness to Face *Society 5.0* Era, What Interpersonal Skill Does an Accounting Student Have?: An Evidence from Indonesia. *Procedia Business and Financial Technology*, 1(Iconbmt), 1–6. <https://doi.org/10.47494/pbft.2021.1.9>
- Ilmianah, N. (2019). Peran Guru dalam Melahirkan Generasi Emas dalam Era Industri 4.0 pada Pendidikan Kejuruan. *Jurnal Vokasi Dan Teknik Otomotif*, 1(2), 87–103.
- Irawan, F. (2021). Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi E. *Pengmasku*, 1(1), 22–28.
- Iscan, E. (2021). An Old Problem in the New Era : Effects of Artificial Intelligence to Unemployment on the Way to Industry 5 . 0. *Journal of Yasar University*, October 2020, 77–94.
- Longo, F., Padovano, A., & Umbrello, S. (2020). Value-oriented and ethical technology engineering in industry 5.0: A human-centric perspective for the design of the factory of the future. *Applied Sciences*, 10(12), 1–25. <https://doi.org/10.3390/APP10124182>
- Nahavandi, S. (2019). Industry 5.0-a human-centric solution. *Sustainability (Switzerland)*, 11(16), 1-13. <https://doi.org/10.3390/su11164371>
- Nugroho, W. (2022). Integrasi Pendidikan Karakter pada Pendidikan Vokasi di Sekolah Menengah Kejuruan. *Vocational: Jurnal Inovasi Pendidikan Kejuruan*, 2(1), 73–84.
- Paschek, D., Mocan, A., & Draghici, A. (2019). Industry 5 . 0 – The Expected Impact of Next Industrial Revolution. Management Knowledge Learning International Conference, 125–132. <http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-25-3/papers/ML19-017.pdf>
- Prassida, G. F., & Asfari, U. (2022). A Conceptual Model for the Acceptance of Collaborative Robots in Industry 5.0. *Procedia Computer Science*, 197, 61–67.
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, dan E-Faktur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 1–13.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142.
- Sudarsana, I. K. (2016). Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upayapembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.25078/jpm.v1i1.34>
- Suryanto, S., Hermanto, B., & Rasmini, M. (2019). Analisis Potensi Bea Perolehan Hak Atas



Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Pajak Daerah. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(3), 273–281.
<https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i3.19205>

Waluyo, J. (2009). Peranan Pajak Untuk Meningkatkan Kemandirian Anggaran. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 154–171.
<https://doi.org/10.23917/jep.v10i2.798>